



RENCANA KERJA

TAHUN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang.

Hendaknya Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renja ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018 - 2023 yang akan menjadi pedoman Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 6 |
| 2.2 Analisis Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan..... | 18 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 31 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 33 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat | 46 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 48 |
| 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional | 48 |
| 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 50 |
| 3.3 Program Dan Kegiatan | 54 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 55 |
| 4.1 Rencana Kerja | 55 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| 5.1 Catatan Penting | 65 |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan | 65 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut | 66 |



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 355 / VII / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 83);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49/I/ Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menyusun nama-nama pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 bertugas :
- a. Mengkaji dan mengevaluasi Renja SKPD Tahun 2023 termasuk capaian kemajuan;
 - b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renja SKPD Tahun 2023;
 - d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun Renja SKPD Tahun 2023;
 - e. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renja;
 - f. Menyusun Renja SKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja), bertanggung jawab terhadap penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan (DPA SKPD Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2022).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Prov. Sulsel di Makassar;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan,
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
 Nomor : 355 / VII / 2022
 Tanggal : 25 Juli 2022
 Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Daftar Nama – nama Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|---------------------|---|
| 1. | Kepala BPSDM Prov.SulSel | Pengarah | Bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusunan Renstra Berjalan dengan baik |
| 2. | Sekretaris BPSDM Prov.SulSel | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Penyusunan Renstra di BPSDM |
| 3. | Kepala Sub Bagian Program | Ketua | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim |
| 4. | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 5. | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7. | Kepala Bidang Sertifikasi Dan Pengelolaan Kelembagaan | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 8. | Andi Zubaery Makkarodda, SE | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9. | Amrullah Zainal ,S.Pd | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Achmad Syaiful Bachri, A.Md | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, merupakan rencana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Prov. Sul Sel Tahun Periode 2018-2023 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa meningkatkan pelayanan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan nasional dan global. Begitupula keberadaan SDM Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu kewaktu. Kemampuan yang diperoleh melalui Pendidikan dan Pelatihan sebelumnya mungkin sudah tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan dunia yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya utamanya tuntutan kinerja pelayanan publik yang belum memadai. Menghadapi keadaan yang demikian, maka kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah menjadi sangat relevan, utamanya penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menyediakan layanan publik yang mandiri dan profesional.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah disusun Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Periode 2018-2023 disusun dengan memuat

visi dan misi, tujuan dan sasaran, program, serta kegiatan yang merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dijabarkan dalam bentuk Program yang pelaksanaannya lebih dipertajam secara terukur dan terurai pada kegiatan-kegiatan, penjabaran program kerja organisasi dalam lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Periode 2018-2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023. Rencana Kerja (RENJA) ini menguraikan lebih rinci tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA.

Secara umum Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 memuat kebijakan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya mewujudkan organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajaran yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola kepemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6037)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 lingkup pemerintah daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 249);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistim Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan;

17. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/I/Tahun 2022 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
20. Perka LAN No. 19 Tahun 2015 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator
21. Perka LAN No. 16 Tahun 2015 tentang Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
22. Peraturan Kepala LAN No. 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar CPNS;
23. Keputusan Kepala Lembaga Admininstrasi Negara Nomor 483/K.I/PDP.09 Tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan pelatihan dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Kepemimpinan Pengawas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja tahunan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2023.

Adapun tujuan penyusunan program tahunan tersebut antara lain :

1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan strategis dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Tersedianya tolak ukur rencana kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada pelayanan prima berdasarkan pada prinsi-prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih;
4. Terwujudnya komitmen bersama diantara Stakeholder terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra untuk dijabarkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RENJA, maksud dan tujuan penyusunan RENJA serta sistematika penulisan RENJA.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Bab ini menyajikan gambaran Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, revier terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum Perubahan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Urusan Pengembangan SDM, serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijaksanaan yang akan ditempuh, menggunakan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat dari kebijaksanaan yang akan ditempuh. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini disusun secara sistematis, jelas dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan waktu yang akan dipergunakan. Hal ini sangat penting dan menentukan untuk penetapan indikator dan target kerja dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun Periode 2018-2023. Penyusunan Evaluasi Program kegiatan telah dilaksanakan sesuai jumlah alokasi anggaran dalam APBD Prov. Sul Sel T.A. 2022 keadaan 31 Desember 2021.

Gambaran Evaluasi penggunaan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal serta Capaian Kinerja input, output dan outcome pada TA. 2021-2023 diuraikan pada tabel

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat 2022
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|---|---|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | Percentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|---|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 100 | 100 | 430 Orang | 450 Orang | 104 | 430 Orang | 100 | 100 |
| | Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | 100 | 100 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 12 Dokumen | 100 | 100 |
| | 5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|--|---|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Sertajabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelola Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, | 100 | 100 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 2 Dokumen | 100 | 100 |
| | Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 100 | 100 | 5 Laporan | 5 Laporan | 100 | 5 Laporan | 100 | 100 |
| | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | 100 | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 100 | 100 |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan | 100 | 100 | 30 Orang | 40 Orang | 133 | 30 Orang | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|--|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan | Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 100 | 100 | 180 Orang | 190 Orang | 105 | 180 Orang | 100 | 100 |
| | | | 100 | 100 | 100 Orang | 120 Orang | 120 | 100 Orang | 100 | 100 |
| | Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 100 | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 100 | 100 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Percentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP | 100 | 100 | 0,1 | 98,08 | 99,63 | 0,1 | 100 | 100 |
| | | Percentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|---|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | Percentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| | X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Percentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 2 Dokumen | 100 | 100 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 100 | 100 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100 | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 100 | 100 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Jumlah Dokumen DPASKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD | 100 | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|--|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100 | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 100 | 100 |
| | XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 10 Laporan | 12 Laporan | 120 | 10 Laporan | 100 | 100 |
| | X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 99,45 | 99,45 | 100 | 100 | 100 |
| | XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 100 | 134 Orang | 134 Orang | 100 | 134 Orang | 100 | 100 |
| | XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 100 | 100 |
| | XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 100 | 100 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 12 Dokumen | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|---|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 100 | 100 |
| | XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 100 | 100 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 2 Dokumen | 100 | 100 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulan/Semester SKPD | 100 | 100 | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 4 Laporan | 100 | 100 |
| | XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 100 | 100 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 2 Dokumen | 100 | 100 |
| | X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 93,15 | 93,15 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|---|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappnya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 100 | 100 | 185 Pasang | 185 Pasang | 100 | 185 Pasang | 100 | 100 |
| | XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 100 | 100 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 12 Dokumen | 100 | 100 |
| | X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 97,22 | 97,22 | 100 | 100 | 100 |
| | XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 | 100 | 9 paket | 8 paket | 80,1 | 10 paket | 100 | 100 |
| | XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 | 100 | 15 paket | 14 paket | 93,33 | 20 paket | 100 | 100 |
| | XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 | 100 | 20 paket | 20 paket | 100 | 20 paket | 100 | 100 |
| | XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|---|---|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 100 | 100 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 100 | 100 | 1 paket | 1 paket | 100 | 1 paket | 100 | 100 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 100 | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 100 | 100 |
| | X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 100 | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|---|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 100 | 100 |
| | X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100 | 100 | 13 Unit | 13 Unit | 100 | 13 Unit | 100 | 100 |
| | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100 | 100 | 3 Unit | 3 Unit | 100 | 3 Unit | 100 | 100 |
| | XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 100 | 100 | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 100 | 2 Aplikasi | 100 | 100 |
| | XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100 | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 100 | 100 |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 | TARGET RENJA PD 2021 | REALISASI RENJA PD 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022) (%) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN | |
|----|--|---|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 100 | 100 | 40 Unit | 40 Unit | 100 | 20 Unit | 100 | 100 |

2.2. Analisis Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023, maka telah ditetapkan tujuh program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran dari Rancangan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yakni misi pembangunan daerah ke-1 :

- 1. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**
- 2. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan**
- 3. Sasaran 1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

dimana sasarannya antara lain adalah "**Meningkatnya Derajat Kecerdasan Dan Penguasaan Iptek Masyarakat**".

Berbagai kegiatan Pelatihan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022, baik kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, dan/atau sumber dana lainnya yang sah. maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

A. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya (Prioritas)

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern.Selain itu program ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada organisasi pemerintahan. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktifitas pegawai. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa kegiatan kediklatan yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Pelatihan Kepemimpinan. Adapun kegiatan kediklatan dalam program ini sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari 2 Sub. Kegiatan;
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari 5 Sub. Kegiatan;
 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional.
 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar.
 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen Pelatihan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan latihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan di bidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena keterbatasan sumber daya, akan menjadi kewenangan provinsi sebagai fungsi fasilitasi disamping kewenangan

untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan.

Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (*training delivery*) ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (*training development*). Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta disain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat (*training need analysis*) dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi Jabatan ASN dan Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan dan pedoman lainnya yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program Pelatihan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi untuk dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan sistem pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentatif. Sementara itu untuk menciptakan tolok ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program-program Pelatihan, maka diperlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi Pelatihan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan.

Penyusunan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ini mengacu pada pertimbangan pada saat ini tercatat sekitar 450-an lembaga diklat baik yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (SIDA LAN RI, 2013). Dengan begitu banyaknya lembaga diklat aparatur, salah satu agenda penting dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat adalah penataan kelembagaan diklat daerah yang diarahkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) lembaga diklat.

Penataan kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperbaiki totalitas sistem organisasi diklat yang terdiri dari aspek-aspek kelembagaan diklat yang statis (struktur organisasi, uraian jabatan, syarat jabatan), dan aspek ketatalaksanaan dan proses yang dinamis seperti pedoman kerja, tata hubungan kerja, dan koordinasi di dalam dan dengan organisasi luar.

Penataan kelembagaan diklat ini perlu dilakukan mengingat fungsi penyelenggaraan diklat itu sangat terkait erat dengan berbagai stakeholders seperti bagian kepegawaian, instansi pengirim/dinas dan badan terkait. Disamping itu penataan kelembagaan juga diperlukan untuk mendorong lembaga diklat agar lebih berfokus pada upaya inovasi program dan metode pelaksanaan diklat yang efektif dalam peningkatan kompetensi aparatur. Dalam praktik kediklatan, kita masih menjumpai beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan kelembagaan diklat.

Diperlukan penataan koordinasi yang lebih erat antara bidang diklat dengan bidang kepegawaian terutama menyangkut rekrutmen dan seleksi calon peserta diklat, dan penempatan serta pemberdayaan alumni atau lulusan diklat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dari beberapa fenomena tersebut, maka diperlukan rumusan strategi penataan kelembagaan diklat daerah agar benar-benar mampu menjadi pendukung peningkatan kompetensi aparatur di daerah dan juga dalam rangka meningkatkan jejaring kediklatan maka diperlukan beberapa strategi dalam membangun Kemitraan dan Jejaring.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana kelengkapan kebutuhan pelayanan administrasi kantor, barang dan keuangan, penyediaan sistem informasi manajemen Pelatihan, kepegawaian dan keuangan, pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur, penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta pengelolaan multi media pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga Pengembangan sumber daya manusia yang terakreditasi, sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Pelatihan sesuai standar yang dipersyaratkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini adalah:

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelatihan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga Pengembangan sumber daya manusia terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola Pelatihan yang profesional dan mandiri, untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan melalui Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Penyusunan Laporan Tahunan Pelatihan dan bahan LKPJ Gubernur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dan LPPD yang merupakan dokumen Akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, untuk meningkatkan Disiplin, Motivasi Kerja serta peningkatan Kualitas dan Kompetensi seluruh Sumber Daya Aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang menuntut adanya ketersediaan administrasi kepegawaian aparat OPD serta ketersediaan Laporan Administrasi Kepegawaian.

C. Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Pengembangan SDM Prov.Sul-Sel

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 memuat 2 program 7 Kegiatan dan 34 Sub. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dengan rincian pendanaan selang 3 Tahun sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Prioritas) terdiri dari 2

Kegiatan 7 Sub. Kegiatan;

➤ Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari 2 Sub. Kegiatan;

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

➤ Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari 5 Sub. Kegiatan;

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama,

Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional.

- Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar.
- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

D. Indikator Kinerja

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 terdapat 2 Program dengan indikator kinerja (Outcome) sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA (PRIORITAS)

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern, dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Terpenuhinya Hak dan Kesempatan ASN untuk memperoleh Pengembangan Kompetensi sebanyak minimal 20 Jam Pelajaran per tahun.

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Terpenuhinya administrasi perkantoran, Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran, Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu, Terpenuhinya ASN berkinerja sangat baik.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SPM/ STAND AR NASIO NAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CAPAIAN ANALISIS |
|----|---|-------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | | 100 | 430 Orang | 430 Orang | 430 Orang | 430 Orang | 450 Orang | 460 Orang | 430 Orang | 430 Orang | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | | 100 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | |
| | Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, | | 100 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SPM/ STAND AR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CAPAIAN ANALISIS |
|----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | | 100 | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | |
| | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | 100 | 310 Orang | 310 Orang | 310 Orang | 310 Orang | 340 Orang | 360 Orang | 310 Orang | 310 Orang | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SPM/ STAND AR NASIO NAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CAPAIAN ANALISIS |
|----|--|-------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP | | 100 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,63 | 99,66 | 0,1 | 0,1 | |
| | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah | | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik | | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | Jumlah Dokumen DPASKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SPM/ STAND AR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CAPAIAN ANALISIS |
|----|--|------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | |
| | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,45 | 99,85 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 100 | 134 Orang | 134 Orang | 134 Orang | 134 Orang | 134 Orang | 134 Orang | 134 Orang | 134 Orang | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 100 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | 100 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SPM/ STAND AR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CAPAIAN ANALISIS |
|----|---|------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semester SKPD | | 100 | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 100 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,15 | 95,85 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | 100 | 185 Pasang | 185 Pasang | 185 Pasang | 185 Pasang | 165 Pasang | 185 Pasang | 185 Pasang | 185 Pasang | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | 100 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | |
| | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,22 | 98,54 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 100 | 9 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 8 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 100 | 15 Paket | 24 Paket | 24 Paket | 24 Paket | 14 Paket | 20 Paket | 24 Paket | 24 Paket | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SPM/ STAND AR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CAPAIAN ANALISIS |
|----|--|------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 100 | 20 Paket | 20 Paket | 20 Paket | 20 Paket | 20 Paket | 20 Paket | 20 Paket | 20 Paket | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | 100 | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | |
| | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |
| | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SPM/ STAND AR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CAPAIAN ANALISIS |
|----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | 100 | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 100 | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | |
| | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | 100 | 1 Aplikasi | 2 Aplikasi | 2 Aplikasi | 2 Aplikasi | 1 Aplikasi | 2 Aplikasi | 2 Aplikasi | 2 Aplikasi | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | | 100 | 40 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 40 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi penunjang yang telah digambarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, masih mempunyai permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap tugas pokok dan fungsi Lembaga. Tantangan Global Birokrasi merupakan tantangan yang harus dihadapi di era saat ini. Adapun hal-hal yang eksternal yang mencangkup tantangan global yaitu Vuca, situasi yang mudah berubah-ubah, tidak pasti, kompleks dan ambiguitas, selanjutnya Digital Disruption yang merupakan perubahan terhadap teknologi digital serta proses bisnis yang mempengaruhi pelayanan publik. Millennial Disruption, Perubahan terhadap perilaku birokrat menjadi flexible, open minded, faster service. Pandemic Disruption, merupakan situasi pandemi yang mengubah tatanan kehidupan sosial dan ekonomi.

Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah masih banyaknya PNS yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi PNS. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa isu permasalahan penting yang dihadapi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan diidentifikasi sebagai berikut:

2.3.1. Aspek Hasil Kerja (Kinerja)

- a. Belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
- b. Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS, sesuai dengan Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS “Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun), sehingga belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.
- c. Reformasi birokrasi terus diterapkan secara optimal, terutama dari parameter manajemen kepegawaian. Reformasi birokrasi terus ditingkatkan sehingga memenuhi target reformasi birokrasi daerah yang sudah di tetapkan melalui program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai.

2.3.2. Aspek Internal

Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur belum memadai untuk mencetak aparatur berkelas dunia.

- a. Aspek kewenangan : Kapasitas dan kapabilitas BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencetak aparatur yang SMART ASN belum optimal.
- b. Aspek Perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur : Kapasitas dan Kapabilitas Perencanaan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam merencanakan Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- c. Aspek Pengordinasian: Kapasitas dan kapabilitas pengorganisasian BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan secara optimal.
- d. Aspek Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ; belum tercapainya proses pembelajaran berstandar internasional.

Aspek Evaluasi dan Pengembangan Pelatihan : Kapasitas dan kapabilitas evaluasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal meningkatkan kualitas pelayanan pengembangan kompetensi.

2.3.3. Aspek Eksternal

Aspek eksternal berasal dari Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan tuntutan masyarakat, yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tuntutan Regulasi akan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial,Sosial Kultural dan Teknis serta Pemerintahan.
- b. Tuntutan Grand Design Reformasi Birokrasi dan World Class Apparatus Tahun 2024.
- c. Tuntutan Masyarakat akan ASN yang Profesional sesuai perkembangan zaman.
- d. Tuntutan Kebutuhan SDM yang Kompeten untuk mendukung Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan.
- e. Tuntutan Revolusi Industri 4.0 akan PNS yang mampu melayani Masyarakat dengan cepat menggunakan sarana digital.

Pencapaian sasaran strategis BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran Utama, yaitu :

- a. Bobot Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas Aparatur;
- b. Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bersertifikat kompetensi; dan
- c. Jumlah Akreditasi Pengembangan Kompetensi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, program kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel, baik dari segi jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan, target indicator kinerja, serta pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan serta telah dilakukan review pembahasan dan verifikasi serta finalisasi pemetaan program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Tabel T-C 31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|------------------|---|----------------------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | MAKASSAR | Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan Kualitas Baik | 100 | 6.330.130.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | MAKASSAR | Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan Kualitas Baik | 100 | 3.521.006.800,00 | | |
| | | Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan Kualitas Baik | 100 | | | MAKASSAR | Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan Kualitas Baik | 100 | | | |
| | | Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dengan Kualitas Baik | 100 | | | MAKASSAR | Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dengan Kualitas Baik | 100 | | | |
| | | Persentase Akreditasi Kelembagaan yang sesuai standart | 90 | | | MAKASSAR | Persentase Akreditasi Kelembagaan yang sesuai standart | 90 | | | |
| 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | MAKASSAR | Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1070 | 1.803.496.000,00 | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | MAKASSAR | Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1070 | 1.011.310.500,00 | | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------|---|-------------|----------------|---|----------|---|-------------|----------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | MAKASSAR | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 1070 | 983.269.000,00 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | MAKASSAR | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 1070 | 951.811.500,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|----------------|---|----------------------|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|--|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | 1 | 820.227.000,00 | Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | 1 | 59.499.000,00 | | | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------|---|-------------|------------------|--|----------|---|-------------|------------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | MAKASSAR | Jumlah Pejabat Pemprov.SulSel yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional | 430 | 4.526.634.000,00 | 5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | MAKASSAR | Jumlah Pejabat Pemprov.SulSel yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional | 430 | 2.509.696.300,00 | |
| | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | 1 | 202.725.000,00 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | 1 | 207.555.300,00 | |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 430 | 1.516.662.000,00 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 430 | 2.071.331.400,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------|--|-------------|--------------------------|---|----------|--|-------------|--------------------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 | 705.080.000,00 | Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang KompetensiPengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 | 230.809.600,00 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | MAKASSAR | Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP | 0,1 | 34.910.382.732,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | MAKASSAR | Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP | 0,1 | 26.726.285.372,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|------------------|---|----------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | MAKASSAR | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah | 98 | | | MAKASSAR | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah | 98 | | | |
| | | MAKASSAR | Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik | 98 | | | MAKASSAR | Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik | 98 | | | |
| X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15 | 1.079.784.000,00 | X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15 | 760.285.000,00 | | | |
| XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 753.670.000,00 | XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 644.554.900,00 | | | |
| XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen RKASKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 50.145.000,00 | XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen RKASKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 15.200.000,00 | | | |
| XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 22.169.000,00 | XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 15.200.000,00 | | | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|--|----------|--|-------------|--------------------------|--|----------|--|-------------|--------------------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen DPA SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 87.000.000,00 | XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen DPASKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 15.200.000,00 | |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 20.316.000,00 | XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 15.200.000,00 | |
| | XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 | 146.484.000,00 | XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 | 54.930.100,00 | |
| | XXX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 56 | 25.687.145.124,00 | XXX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 56 | 21.644.414.808,00 | |
| | XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | MAKASSAR | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 134 | 25.001.400.000,00 | XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | MAKASSAR | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 134 | 21.225.920.308,00 | |
| | XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 500.462.724,00 | XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 304.126.400,00 | |
| | XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 34.873.100,00 | XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 27.640.700,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------|--|-------------|-----------------------|---|----------|--|-------------|-----------------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | MAKASSAR | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 | 55.700.000,00 | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | MAKASSAR | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 | 27.710.200,00 | |
| | XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 | 35.000.000,00 | XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 | 27.580.400,00 | |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD | MAKASSAR | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKPD | 4 | 40.820.300,00 | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKPD | MAKASSAR | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKPD | 4 | 22.273.000,00 | |
| | XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 | 18.889.000,00 | XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 | 9.163.800,00 | |
| | X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 | 724.345.000,00 | X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 | 195.957.600,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------|--|-------------|-------------------------|---|----------|--|-------------|-----------------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | MAKASSAR | Jumlah Paket Pakaian DinaBeserta Atribut Kelengkapan | 5 | 158.850.000,00 | XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | MAKASSAR | Jumlah Paket Pakaian DinaBeserta Atribut Kelengkapan | 5 | - | |
| | XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 565.495.000,00 | XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | MAKASSAR | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 195.957.600,00 | |
| | X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 24 | 3.057.761.640,00 | X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 24 | 846.262.608,00 | |
| | XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor | MAKASSAR | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | 60.000.000,00 | XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor | MAKASSAR | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | 38.987.600,00 | |
| | XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | MAKASSAR | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 | 2.500.000.000,00 | XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | MAKASSAR | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 | 484.669.548,00 | |
| | XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | MAKASSAR | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 | 54.353.000,00 | XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | MAKASSAR | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 | 49.265.000,00 | |
| | XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu | MAKASSAR | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 193.104.640,00 | XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu | MAKASSAR | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 102.523.660,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|--|----------|--|-------------|------------------|--|----------|--|-------------|------------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 250.304.000,00 | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 170.816.800,00 | |
| | X.XX.01.1.07 XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | MAKASSAR | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | 5 | 580.000.000,00 | X.XX.01.1.07 XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | MAKASSAR | Persentase Pengadaan barang milik daerah | 1005 | 38.179.000,00 | |
| | XXX Pengadaan Mebel | MAKASSAR | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 | 80.000.000,00 | XXX Pengadaan Mebel | MAKASSAR | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 | - | |
| | XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | MAKASSAR | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 500.000.000,00 | XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | MAKASSAR | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | - | |
| | XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | MAKASSAR | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 | 45.800.000,00 | XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | MAKASSAR | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 | 38.179.000,00 | |
| | X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 24 | 2.349.230.168,00 | X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 24 | 2.479.240.536,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------|--|-------------|-------------------------|---|----------|--|-------------|-----------------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemerintahan Daerah | | | | | Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 1.581.629.000,00 | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 936.792.468,0 | |
| | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 767.601.168,00 | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | MAKASSAR | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 1.542.448.068,00 | |
| | X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MAKASSAR | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 38 | 2.012.116.800,00 | X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MAKASSAR | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 38 | 761.945.820,00 | |
| | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | MAKASSAR | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 13 | 450.760.000,00 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | MAKASSAR | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 13 | 257.493.800,00 | |

| No | Rancangan Awal | | | | | Analisa Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------|--|-------------|----------------|---|----------|--|-------------|----------------|-----------------|
| | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Program Dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target 2023 | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | MAKASSAR | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 | 180.390.000,00 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | MAKASSAR | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 | 72.352.020,00 | |
| | XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | MAKASSAR | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 | 50.000.000,00 | XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | MAKASSAR | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 | 25.000.000,00 | |
| | XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | MAKASSAR | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 1 | 894.280.000,00 | XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | MAKASSAR | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 1 | 210.000.000,00 | |
| | XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | MAKASSAR | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 | 486.686.800,00 | XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | MAKASSAR | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 | 197.100.000,00 | |

Antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa perbedaan, diantaranya :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD 2023, penurunan pagu terdapat pada kegiatan :
 - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD 2023, penurunan pagu terdapat pada kegiatan :
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan FungsionalPenurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD 2023 disebabkan target pendapatan yang menurun dari target tahun sebelumnya, sehingga hal ini berdampak pada kebutuhan anggaran administrasi yang tidak mencukupi.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 seharusnya juga memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat tersebut diperoleh dari hasil Musrenbang dimana semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, hal ini dapat dilihat pada tabel T-C 32:

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terutama pada pasal 27 ayat (2) yaitu bahwa "*Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat*", telah menjadi acuan utama bagi satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja tahunannya. Kemudian pasal 23 ayat (4) pada peraturan ini, juga mempertegas hal tersebut, yaitu bahwa "RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

Dengan adanya aturan perundangan tersebut maka Badan Pengembangan sumber daya manusia berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang terkait dengan program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui berbagai kegiatan utama pendidikan dan pelatihan untuk menunjang pembangunan daerah. Selanjutnya pada sisi lain, kedudukan dan peran lembaga Pelatihan perlu semakin diperkuat dan ditingkatkan sejalan dengan nuansa, semangat dan filosofi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Perda ini memposisikan Badan Pengembangan sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan membantu Gubernur dalam merumuskan, memfasilitasi,

melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan SDM aparatur dilingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se sulawesi selatan, sehingga Gubernur dalam menjalankan kewenangannya, baik kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dalam bidang pengembangan SDM aparatur dengan sendirinya menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Peraturan Gubernur No. 73 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan sumber daya manusia menetapkan 4 (empat) kebijakan yaitu :

- 1) Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat
- 2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Pelatihan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama Pelatihan
- 4) Pengembangan kualitas WidyaSwara dan penyelenggara untuk memenuhi regulasi Pelatihan.

Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia aparatur pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan arah kebijakan pembangunan aparatur sipil negara yang dibagi menjadi empat tahapan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), dengan sasaran menciptakan Good Governance Tahun 2005 – 2009, mewujudkan Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014, memberlakukan Sistem Merit Tahun 2015 – 2019, dan mencapai Birokrasi Berkelas Dunia di tahun 2020 – 2024.

Saat ini pembangunan ASN sudah saatnya berada pada tahap pemberlakuan Sistem Merit sehingga profesionalitas dan kompetensi ASN dijadikan tolak ukur untuk peningkatan karir sumber daya aparatur. Peningkatan kompetensi aparatur tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan lembaga yang berfungsi membangun kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Hal tersebut di atas tentunya sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 21 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi”. Hak PNS untuk mendapatkan pengembangan kompetensi juga ditekankan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 203 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan

bahwa "Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi". Pada ayat (4) pasal 203 tersebut dijelaskan lagi bahwa "Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun". Dengan demikian sudah jelas kebijakan nasional yang mengamanatkan dilakukannya pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu pilar yang harus mampu menciptakan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perubahan nomenklatur dari Badan Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memerlukan transformasi dalam berbagai aspek, terutama aspek perbaikan pelayanan. Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan provinsi, dimana dinamika kebutuhan atas kebutuhan pengembangan kompetensi SDM pemerintah yang kompleks, maka BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu menjadi perangkat daerah yang mempersiapkan peningkatan kompetensi bagi aparatur di Sulawesi Selatan.

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang mempersiapkan aparatur Sulawesi Selatan, dituntut agar mempersiapkan aparatur yang mampu bekerja dan meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kemampuan yang terkait dalam suatu organisasi. Dalam mencapai Visi, Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Akreditasi Penyelenggaraan Diklat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BPSDM dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu lima tahun yang akan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan serta visi, misi pembangunan daerah Sulawesi Selatan, maka BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah menetapkan 4 (empat) sasaran, diantaranya sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi PNS Pemprov SulSel

Adapun yang melatar belakangi sasaran tersebut adalah tuntutan zaman dan keinginan masyarakat akan pelayanan yang maksimal perlu diikuti dengan perkembangan kemampuan kompetensi aparatur, untuk itu BPSDM Sulawesi Selatan mengakomodir keinginan dan tuntutan tersebut dengan mempersiapkan peningkatan pengembangan kompetensi yang beragam, sehingga mulai aparatur tingkat bawah sampai pimpinan daerah tidak hanya menguasai satu jenis kompetensi saja melainkan dapat lebih berkembang dengan tersedianya pengembangan kompetensi baik manajerial, sosiokultural, teknis dan pemerintahan. Upaya ini diharapkan agar aparatur mempunyai peningkatan secara integritas dan profesionalisme dalam mengemban tugas pokoknya secara lebih baik agar masyarakat lebih percaya terhadap perilaku aparatur yang mencerminkan kualitas pemerintah.

3.2.2. Meningkatnya PNS Pemprov SulSel yang Bersertifikat Kompetensi

Pengembangan kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah akan diujiberdasarkan kriteria tertentu, sehingga aparatur yang dihasilkan benar-benar aparatur yang mampu memberikan layanan terhadap masyarakat dan membantu mencerdaskan semua elemen masyarakat dengan pembuktian berupa sertifikat kompetensi. Sehingga aparatur yang benar-benar kompeten yang akan membantu menyelesaikan dan mengarahkan program kegiatan sesuai dengan kompetensinya Seperti istilah “The man behind the gun” kehebatan dan kekuatan seorang aparatur bukan pada material akan tetapi siapa yang menggunakan kemampuan tersebut, seperti pisau yang harus diarah, demikian pula kemampuan aparatur perlu di asah dengan peningkatan kemampuan kompetensi agar mampu menghadapi tuntutan zaman yang berkembang terus menerus diiringi kemampuan perkembangan teknologi yang kian pesat. Sertifikasi merupakan jaminan aparatur yang kompeten di bidangnya sehingga dalam pemetaan aparatur tepat sasaran dalam mengemban tugas yang diberikan negara.

3.2.3. Meningkatnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di Sulawesi Selatan.

Smart ASN merupakan kelompok aparatur yang memiliki kelebihan dengan ditandai dengan menguasai beberapa aspek, yaitu: Nasionalisme, Integritas, Wawasan Global, Hospitality, Networking, Teknologi Informasi, Bahasa Asing, dan Entrepreneurship. Pengetahuan dan keterampilan Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senakin berkembang dengan ditandai oleh banyaknya pejabat yang

memiliki gelar akademis yang tinggi, sehingga secara logikapun mereka termasuk dalam golongan yang sudah matang, yang memiliki kelebihan dalam berpikir, berperilaku dan memiliki wawasan yang lebih dalam hal managemen. Kelompok inilah yang disebut SMART ASN, Smart ASN harus merupakan aparatur yang “Talent Pool”. Talent Pool adalah sekelompok orang yang dinilai bertalenta yang jumlahnya kecil (ditentukan) yang menunjukkan superior performance atau istimewa lain daripada yang lain, yang menjadi panutan atau cermin bagi karyawan lain dalam kehidupannya bukan hanya spesifik di pekerjaannya, lebih cenderung patokan perilaku (tindak tanduk) bagi karyawan lainnya sesuai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan.

Sehingga diharapkan ASN yang memiliki Talent Pool dapat menularkan kebiasaan tersebut kepada lingkungan sekitarnya dan akan berakar menjadi kebiasaan (habit) bagi masyarakat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyelenggarakan Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan strategis. Oleh karena itu BPSPDM Sulawesi Selatan juga ke depan akan mempersiapkan pengembangan kompetensi berbasis Talent Pool agar aparatur Sulawesi Selatan memiliki nilai tambah dalam menduduki jabatan yang strategis.

3.2.4. Terwujudnya pelayanan BPSPDM yang berkualitas

Untuk membentuk dan mempersiapkan aparatur yang SMART, diperlukan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan berkualitas membutuhkan suatu sistem manajemen yang teruji, berkualitas, dan dinamis, dan ini ditemukan jika sistem manajemen diklat berbasis Corporate University (Corpu).

Seiring perkembangan zaman dan berawal dari perusahaan swasta yang harus bertahan dan berhasil digilas oleh kemajuan zaman dan tuntutan revolusi industry, muncullah istilah “Corporate University” (Corpu). Di Indonesia yang berhasil menerapkan sistem tersebut adalah Telkom Corpu, Corpu berbeda dengan konsep pendidikan dan latihan, Corpu mengacu pada program pengembangan SDM secara terarah dan sistematis, serta terkait dengan pencapaian visi-misi dan strategi suatu lembaga. Corpu lebih pada aktivitas business solution. Sementara itu, dalam konsep diklat atau training center (TC) program pembelajaran hanya dipandang sebagai proyek, bukan bagian dari change management.

Aktivitas TC lebih mengarah pada menutup kesenjangan kompetensi karyawan. Dalam konteks change management, idealnya kompetensi seperti itu bisa diaplikasikan lintas perusahaan, bahkan lintas industry. Ini memunculkan gagasan bahwa konsep Corpu seyogyanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan karyawan sendiri tapi juga membuka diri bagi karyawan perusahaan lain. Intinya managemen Corpu merupakan

sistem manajemen yang berguna untuk menopang organisasi dalam peningkatan kualitas SDM. Diharapkan dengan tercapainya 4 (empat) sasaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan ASN di Sulawesi Selatan dalam menghadapi tantangan dan peluang baik dari dalam maupun dari luar.

Terdapat tujuh pondasi Corporate University yang harus disiapkan oleh BPSDM agar Corpu bisa berjalan baik, yakni:

1. Learning Strategic Governance

Yaitu dukungan dari pimpinan serta mengelola Corpu dalam sistem organisasi Sulawesi Selatan sebagai suatu kesatuan sistem learning.

2. Learning Focus

Pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan agenda Sulawesi Selatan.

3. Knowledge Management

Yakni bagaimana mengumpulkan dan mengelola best practice SulSel menjadi bahan pembelajaran untuk disampaikan ke setiap ASN atau tacit knowledge menjadi explicit knowledge.

4. Learning Infrastructure

Berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang menunjang berbagai pilihan pembelajaran, terutama pembelajaran secara jarak jauh atau virtual, pelayanan secara online, command centre, sertifikat elektronik, dll.

5. Learning Delivery System

Yaitu memastikan penerimaan pembelajaran berlangsung dengan lancar, baik secara klasikal maupun maupun non klasikal, diklat dan non diklat, individu dengan coaching dan mentoring, serta pelayanan untuk magang dan pertukaran pegawai.

6. Learning Architecture

Yaitu berkaitan dengan metode, kurikulum, substansi pembelajaran, dan lain-lain agar sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan organisasi dalam hal ini agenda untuk SulSel juara.

7. Learning System

Yaitu berkaitan dengan jenis kompetensi yang akan diprioritaskan, sertifikasi keahlian yang didapatkan, kolaborasi dengan eksternal untuk peningkatan mutu pelayanan, assesment centre, riset dan development, dan lain-lain.

Gambar 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023

| |
|--|
| VISI PROVINSI SULAWESI SELATAN 2018-2023 |
| Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter |
| MISI KE-1 RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2018-2023 |
| Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif |
| TUJUAN BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN |
| Meningkatkan Kualitas Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan |
| SASARAN BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN |
| Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat |

3.3 Program Dan Kegiatan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 maka program dan kegiatan dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Program/ kegiatan baik strategis maupun operasional merupakan tanggungjawab Perangkat Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

1. Program Operasional, terdiri dari :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Strategis, terdiri dari :
 - a. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 memiliki 1 (Satu) Program Operasional, 1 (Satu) Program Strategis dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 41.753.209.732,00.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa pada RPKD tahun 2023, Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel telah merencanakan pelaksanaan 2 Program, 9 Kegiatan dan 34 sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 41.753.209.732,00,-**. Program dan kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel. Selanjutnya untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indicator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang menggambarkan tolak ukur kinerja / target yang diinginkan untuk masing-masing program dan kegiatan.

Indicator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam renja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, indicator kinerja serta pendanaan indikatif untuk perubahan anggaran tahun 2023, yang dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 :

Tabel T-C 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PROV. SULSEL**

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|---|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural | Makassar | 100 % | 6.330.130.000,00 | APBD | | 100 % | 6.330.130.000,00 |
| | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis | Makassar | 100 % | 1.803.496.000,00 | APBD | | 100 % | 1.803.496.000,00 |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Makassar | 30 Orang | 983.269.000,00 | APBD | | 30 Orang | 983.269.000,00 |
| | | | | 55 Orang | | | | 55 Orang | |
| | | | | 159 Orang | | | | 159 Orang | |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|--|---|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | Makassar | 24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina | 820.227.000,00 | APBD | | 24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina | 820.227.000,00 |
| | | | Makassar | 24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina | | APBD | | 24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina | |
| | 5.04.02.1.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Makassar | 100 % | 4.526.634.000,00 | APBD | | 100 % | 4.526.634.000,00 |
| | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama PengembanganKompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Sertjabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, | Makassar | 30 Orang | 558.890.000,00 | APBD | | 30 Orang | 558.890.000,00 |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|--|--|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Makassar | 3 Dokumen | 1.543.277.000,00 | APBD | | 3 Dokumen | 1.543.277.000,00 |
| | | | Makassar | 25 Orang | | | | 25 Orang | |
| | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | Makassar | 6 MOU/PKS | 202.725.000,00 | APBD | | 6 MOU/PKS | 202.725.000,00 |
| | | | Makassar | 55 Orang | | | | 55 Orang | |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Makassar | 30 Orang | 1.516.662.000,00 | APBD | | 30 Orang | 1.516.662.000,00 |
| | | | Makassar | 180 Orang | | | | 180 Orang | |
| | | | Makassar | 100 Orang | | | | 100 Orang | |
| | Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Makassar | 24 Kab/Kota instansi pembina | 705.080.000,00 | APBD | | 24 Kab/Kota instansi pembina | 705.080.000,00 |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan | | Makassar | | | APBD | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP | Makassar | 0 % | 34.910.382.732,00 | APBD | | 0 % | 34.910.382.732,00 |
| | | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah | Makassar | 100 % | | APBD | | 100 % | |
| | | Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik | Makassar | 100 % | | APBD | | 100 % | |
| | X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Makassar | 100 % | 1.079.784.000,00 | APBD | | 100 % | 1.079.784.000,00 |
| | XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Makassar | 50 Orang | 753.670.000,00 | APBD | | 50 Orang | 753.670.000,00 |
| | | | Makassar | 2 Dokumen | | APBD | | 2 Dokumen | |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|---|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | | Makassar | 4 Dokumen | | APBD | | 4 Dokumen | |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah Dokumen RKASKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Makassar | 1 Dokumen | 50.145.000,00 | APBD | | 1 Dokumen | 50.145.000,00 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Makassar | 1 Dokumen | 22.169.000,00 | APBD | | 1 Dokumen | 22.169.000,00 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Makassar | 1 Dokumen | 87.000.000,00 | APBD | | 1 Dokumen | 87.000.000,00 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Makassar | 1 Dokumen | 20.316.000,00 | APBD | | 1 Dokumen | 20.316.000,00 |
| | XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Makassar | 10 Laporan | 146.484.000,00 | APBD | | 10 Laporan | 146.484.000,00 |
| | X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Makassar | 100 % | 25.687.145.124,00 | APBD | | 100 % | 25.687.145.124,00 |
| | XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Makassar | 134 Orang | 25.001.400.000,00 | APBD | | 134 Orang | 25.001.400.000,00 |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Makassar | 1 Dokumen | 500.462.724,00 | APBD | | 1 Dokumen | 500.462.724,00 |
| | XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Makassar | 12 laporan | 34.873.100,00 | APBD | | 12 laporan | 34.873.100,00 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Makassar | 2 Laporan | 55.700.000,00 | APBD | | 2 Laporan | 55.700.000,00 |
| | XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Makassar | 2 Laporan | 35.000.000,00 | APBD | | 2 Laporan | 35.000.000,00 |
| | XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semester SKPD | Makassar | 3 Laporan | 40.820.300,00 | APBD | | 3 Laporan | 40.820.300,00 |
| | XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Makassar | 4 Laporan | 18.889.000,00 | APBD | | 4 Laporan | 18.889.000,00 |
| | X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah | Makassar | 100 % | 724.345.000,00 | APBD | | 100 % | 724.345.000,00 |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|---|--|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Makassar | 185 Pasang | 158.850.000,00 | APBD | | 185 Pasang | 158.850.000,00 |
| | XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Makassar | 134 Orang | 565.495.000,00 | APBD | | 134 Orang | 565.495.000,00 |
| | X.XX.01.1.06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Makassar | 100 % | 3.057.761.640,00 | APBD | | 100 % | 3.057.761.640,00 |
| | XXX Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Makassar | 5 Unit | 60.000.000,00 | APBD | | 5 Unit | 60.000.000,00 |
| | XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Makassar | 80 Unit | 2.500.000.000,00 | APBD | | 80 Unit | 2.500.000.000,00 |
| | XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Makassar | 30 Jenis | 54.353.000,00 | APBD | | 30 Jenis | 54.353.000,00 |
| | XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makassar | 40 Jenis | 193.104.640,00 | APBD | | 40 Jenis | 193.104.640,00 |
| | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makassar | 24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina | 250.304.000,00 | APBD | | 24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina | 250.304.000,00 |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|---|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Makassar | 100 % | 2.349.230.168,00 | APBD | | 100 % | 2.349.230.168,00 |
| | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Makassar | 45 Orang | 1.581.629.000,00 | APBD | | 45 Orang | 1.581.629.000,00 |
| | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Makassar | 1 Tahun | 767.601.168,00 | APBD | | 1 Tahun | 767.601.168,00 |
| | X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Makassar | 100 % | 2.012.116.800,00 | APBD | | 100 % | 2.012.116.800,00 |
| | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Makassar | 13 Unit | 450.760.000,00 | APBD | | 13 Unit | 450.760.000,00 |
| | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Makassar | 7 Unit | 180.390.000,00 | APBD | | 7 Unit | 180.390.000,00 |
| | | | Makassar | 6 Unit | | APBD | | 6 Unit | |
| | XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Makassar | 9 Aplikasi | 0,00 | APBD | | 9 Aplikasi | 0,00 |

| NO | Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----|---|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Makassar | 40 Unit | 894.280.000,00 | APBD | | 40 Unit | 894.280.000,00 |
| | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | Makassar | 140 Unit | 486.686.800,00 | APBD | | 140 Unit | 486.686.800,00 |
| | X.XX.01.1.07 XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % Pengadaan barang milik daerah | makassar | 100% | 564.195.000,00 | APBD | | 100% | 564.195.000,00 |
| | XXX Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | makassar | 1 set | 75.000.000,00 | APBD | | 1 set | 75.000.000,00 |
| | XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | makassar | 1 Paket | 489.195.000,00 | APBD | | 1 Paket | 489.195.000,00 |

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel, yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD). Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2023, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Rencana kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan target dan sasaran pembangunan yang diprioritaskan untuk Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta berkelanjutan di Lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi.

Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan. Untuk tahun 2023 Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 2 (Dua Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 41.753.209.732,00,- (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 menjadi pedoman bagi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2023.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja BPSDM Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 yang dalam pelaksanaannya harus

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan, RENJA PD Tahun 2023 ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2023;
2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bagian lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan wajib menjadikan dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023.
4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renja secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama tahun 2023.

Berdasarkan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh Bidang dan Sekretariat lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan

kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur.

Demikian Rencana Kinerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik serta saran yang membangun demi terciptanya sasaran yang di inginkan sesuai dengan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 agar dapat mendukung keberhasilan terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Makassar, 08 Agustus 2022

